

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 27 NOV 2019
HALAMAN 13 /
RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

Berencana Mau Impor Beras Ketan Asosiasi Lumbung Pangan Kecam Bulog

DINILAI tak masuk akal, rencana impor beras ketan oleh Perum Bulog mendapat penolakan. Saat belum ada impor seperti sekarang saja, beras ketan, beras dan gabah sudah menumpuk di penggilingan. Bahkan tak bisa dijual.

Hal ini ditegaskan Ketua Asosiasi Lumbung Pangan Jawa Timur, Suharno. "Kalau impor jadi, gairah bertani jadi loyo. Petani tidak akan semangat. Impor yang lama saja masih mempengaruhi distribusi beras saat ini," ujarnya.

Pemerintah, kata Suharno, seharusnya menjaga stabilitas harga. Jika beras ketan diimpor, dia menilai, samak saja tidak memikirkan produk petani sendiri. "Harusnya petani ditingkatkan lagi bertanam (beras ketan) daripada impor. Konsep itu yang harus diwujudkan untuk swasembada pangan," kata Suharno.

Dia berharap, ada peningkatan hasil panen dan percepatan tanam pasca kemarau panjang ini. Baik beras biasa maupun beras ketan. "Sehingga panen bisa terjadi tiga kali setahun," tutur Suharno. *RM:13*

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, langkah permintaan impor menunjukkan, Perum Bulog yang dipimpin Budi Waseso, tidak takut dengan ancaman sanksi Jokowi.

"Kalau dilakukan impor

beras ketan, berani sekali itu Bulog, atau Kemendag. Tidak takut dengan ancaman Jokowi. Kalau impor dilakukan, benar benar sudah melanggar perintah Presiden. Hanya menghabiskan devisa," ujarnya.

Menurut Uchok, Bulog harusnya paham, langkah impor ini akan berdampak pada defisit pada neraca perdagangan. Ia mengusulkan agar Presiden merealisasikan ancamannya itu. "Gigit dan copot saja (Kepala Bulog)," ujarnya.

Sedangkan pengamat Ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawerdaya mengatakan, biasanya masa panen padi biasa dan padi beras ketan terjadi di bulan Januari. Untuk meyakinkan urgensi impor, harus ada data produksi dari Badan Pusat Statistik. Impor bisa dipastikan akan menafikan produksi petani di Tanah Air.

Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal membenarkan adanya permohonan impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Bulog ke Kementerian Perdagangan. Permintaan impor dari Vietnam dan Thailand tersebut karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri.

Namun ia tidak merinci, berapa ton pasokan dalam negeri dalam setahun dan kebutuhan total di dalam negeri. ■ JON

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 27 NOV 2019
HALAMAN 31
RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

Semua Komoditas Harus Ekspor

JAKARTA—Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, dalam meningkatkan sektor pertanian banyak sekali memakai data. Namun, banyaknya data digunakan membuat pertumbuhan di sektor pertanian tidak sinkron.

“Selama ini memang terlalu banyak data yang kita pakai. Bisa saja menimbulkan kecurigaan. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita benahi. Mungkin bisa saja berbeda penerapan definisi,” kata Syahrul di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Tak hanya itu, kata Syahrul, dalam peningkatan sektor pertanian harus dengan cara uji lapangan, uji teknologi, salah satunya menggunakan satelit. “Sehingga, akurasi tidak *margin error*. Peningkatan sektor pertanian juga harus dengan uji la-

pangan, bukan hanya sekadar rapat-rapat saja,” imbuh Syahrul.

“Nah, kalau mendekati margin kita harus segera selesaikan. Dan soal *margin error* ini saya akan selesaikan pada 1 Desember,” sambungnya.

Terkait teknologi satelit yang digunakan, terang Syahrul, pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Karena, penggunaan teknologi atau IT dapat mendukung kinerja sektor pertanian dan juga mudah untuk melakukan pengawasan.

“Kita sempurnakan sambil berjalan dengan kemajuan IT yang ada. Nanti teknologi satelit yang digunakan bisa mendeteksi petak-petak sawah, tumbuhan apa yang cocok untuk dipanen di daerah yang dipantau melalui satelit,” ucap Syahrul

Sebagai Menteri Pertanian, dia wajib mempersiapkan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 260 juta jiwa dan tersebar di ribuan pulau.

“Ini harus dipersiapkan dengan baik. Katakanlah menakutkan diri kita. Kemarau kemarin cukup panjang selama 6 bulan, terutama di daerah Jawa dan Sumatera. Kekeringan cukup besar segera kita akan tutupi (tangani, Red),” tegas Syahrul. “Dengan stok-stok yang ada bisa menutupi itu (kekeringan, Red), kita akan lakukan analitik dengan *technographics*,” ujar Syahrul.

Syahrul secara gamblang menyebutkan, pada Januari 2020 petani di Indonesia akan segera masuk musim panen. “Januari akan panen lagi. November akan lapor ke presiden untuk menjawab kekhawatiran,” tutur Syahrul.

Politisi Partai Nasdem itu juga mengungkapkan, saat ini Kementerian Pertanian akan menggenjot ekspor. Tapi, ekspor yang dilakukan juga harus melihat situasi petani di lapangan.

“Mendorong ekspor kita jangka panjang harus tiga kali lipat, Indonesia bisa bersaing dengan kebutuhan dunia, bisa bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika,” kata pria berdarah Sulawesi tersebut.

Pria berkumis tebal itu menyampaikan, bahwa ekspor tidak boleh fokus di komoditas khusus saja. Semua komoditas harus melakukan ekspor agar petani-petani Indonesia sejahtera. “Ekspor itu jangan fokus dikomoditas khusus saja. Penguraian semua sektor. Saya mau pertanian kita bicara (disegani, Red). Oleh karena itu ayo kita ekspor,” tandas Syahrul. (bar)

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 21 NOV 2019
HALAMAN 131
RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

Mentan Syahrul Perbesar Peran Swasta di Sektor Pertanian

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan memperbesar peran dunia usaha atau swasta dalam sektor pertanian. Hal itu dilakukan guna memacu kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) yang saat ini berada di kisaran 13%.

"Kita paham anggaran pemerintah terbatas. Padahal sektor (pertanian) ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Maka, kita balik piramidanya. Dahulu pemerintah yang terbesar, kini perusahaan atau dunia swasta yang akan paling besar porsinya," kata Menteri Syahrul saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurut Syahrul, sektor pertanian adalah sektor usaha yang kompleks dan membutuhkan dukungan banyak pihak agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

"Kita tidak bisa main-main dengan sektor ini. Ada 260 juta orang di negara ini yang butuh pangan. Produktivitas perlu dipacu agar bisa maksimal," ujarnya.

Salah satu hal yang juga akan didorong Menteri Syahrul ialah peningkatan nilai ekspor.

Ia berharap peningkatan dapat tiga kali lipat dari posisi yang ada saat ini.

Dirinya tidak menggantungkan sumbangan ekspor dari komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan kopi sebab hal itu rentan berpengaruh negatif bila terjadi penurunan harga pada salah satu komoditas.

"Kita juga perlu dorong untuk ekspor buah-buahan. Negara sebesar Indonesia jangan kalah dengan Thailand atau Vietnam," tegasnya.

Pembaruan data

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian menjanjikan bahwa pembaruan data pertanian akan tuntas pada 1 Desember mendatang.

Syahrul tidak mau berspekulasi mengenai data terbaru terkait dengan pertanian, termasuk apakah luasan lahan pertanian akan menurun atau tidak. "Yang pasti kita tidak akan menengok ke belakang. Kita gunakan data terbaru untuk kebijakan ke depan," tandasnya.

Bila nantinya ada implikasi anggaran terkait dengan data terbaru, pihaknya akan mengajukan penambahan anggaran. (Uud/E-2) M1-13

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input checked="" type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 21 NOV 2019
HALAMAN
RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

Kementan Turunkan Target Produksi Beras

● DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menurunkan target produksi beras sebesar 34 persen dari 80,08 juta ton pada 2019 menjadi 59,15 juta ton pada 2020. Penurunan tersebut menyesuaikan data kerangka sampel area (KSA) yang mulai diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya memilih membuat target yang realistis agar pencapaian lebih terarah. "Analisis kami menyesuaikan dengan data. Lebih baik kami turunkan sesuai dengan target yang realistis," kata Syahrul di kantor Kementan, Jakarta, Rabu (20/11).

Dia mengatakan, target produksi padi berkaitan langsung dengan anggaran yang dikeluarkan, seperti subsidi pupuk dan bantuan benih. Menurut dia, akan kurang baik jika anggaran yang disediakan pemerintah justru berlebih dari yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika ternyata produksi melampaui target, pemerintah siap untuk menambah kebutuhan anggaran.

Lebih lanjut, mantan gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan, pihaknya ingin agar capaian kinerja Kementan bisa dipertanggungjawabkan. "Tidak boleh dibilang yang penting kita dianggap bagus. Kalau jelek, ya, jelek saja. Memangnya kenapa? Dari pada kita janjikan 80 juta ton, lebih baik kita bilang 59 juta ton sesuai dengan target," ujar Syahrul.

Berdasarkan tingkat rata-rata rendemen padi sebesar 60 persen dari volume panen, jika target 59,15 juta ton pada 2020 tercapai maka setidaknya produksi beras akan mencapai sebanyak 35,5 juta ton. Adapun rata-rata konsumsi beras tahunan yaitu sekitar 30 juta ton per tahun sehingga masih di atas kebutuhan dalam negeri. Angka konsumsi tersebut mengacu pada tren konsumsi beras bulanan masyarakat sebesar 2,3 hingga 2,5 juta ton.

Sementara, untuk tahun ini, mengacu data realisasi produksi padi yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, produksi padi hingga akhir Oktober 2019 baru mencapai 52,82 juta ton atau 64 persen dari target tahun ini.

Dalam dua bulan terakhir tahun ini, Syahrul mengakui kemungkinan akan ada minus antara produksi beras dan kebutuhan bulanan. Meski begitu, ia menyatakan, situasi perberasan akan tetap aman karena stok beras yang tersimpan masih cukup untuk menutup kondisi tersebut. Terakhir, Bulog masih memiliki pasokan beras di gudang sebanyak 2,2 juta ton.

Syahrul mengatakan, untuk mencapai target produksi tahun depan, kuncinya terdapat pada penggunaan benih unggul. Di satu sisi, mengatur pola tanam dan panen lebih baik dengan memanfaatkan teknologi citra satelit. Teknologi tersebut digunakan untuk membaca situasi iklim agar penanaman dapat menghasilkan padi dalam jumlah optimal.

"Bibit itu penting karena bibit membuat anakan, anakan membuat biji padi. Itu ada yang berisi dan hampa, belum lagi bicara yang gagal. Ini harus dihitung," kata Syahrul.

Adapun soal target luas tambah tanam area persawahan tahun depan, Syahrul mengatakan, akan menunggu terlebih dahulu hasil verifikasi luas lahan baku sawah yang akan dirilis pada 1 Desember 2019 mendatang.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, pemerintah pada tahun depan harus lebih cepat mengupayakan penambahan luas lahan sawah. Khudori menuturkan, penambahan luas lahan harus tetap menjadi prioritas pemerintah.

■ ed: ahmad fikri noor

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo | <input type="checkbox"/> Sinar Tani |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post |
| <input type="checkbox"/> Kontan | <input type="checkbox"/> Republika | |

TANGGAL 21 NOV 2019
HALAMAN 7 / 1
RUBRIKASI Berita
 Berita Foto
 Opini/Artikel
 Tajuk
 Pojok/Karikatur

PR Menyejahterakan Petani

Khudori

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang)

Presiden Joko Widodo menunjuk Syahrul Yasin Limpo menjadi Menteri Pertanian.

Setelah diisi seorang profesional, Amran Sulaiman, penunjukan politikus Partai Nasdem ini membuat kursi Kementerian Pertanian kembali diisi politikus, mengulang dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain bukan politikus kemarin sore, Syahrul juga birokrat tulen.

Ia meniti karier dari bawah hingga terpilih jadi Gubernur Sulawesi Selatan dua periode. Sepertinya, Presiden Jokowi ingin pengalaman Syahrul mendobrak birokrasi Sulsel bisa disuntikan di Kementan. Syahrul tak suka rutinitas. Kini, beribu harapan jutaan petani ditumpukan di pundak Syahrul. Salah satu harapan penting adalah membenahi kesejahteraan petani. Diakui atau tidak, selama ini pertanian selalu dikonstruksi sebagai sektor produksi tanpa peduli kesejahteraan pelakunya.

Tidak salah mengonstruksi pertanian sebagai sektor produksi. Sebab, ketika produksi pangan meningkat ketahanan pangan lestari, stabilitas politik dan keamanan akan terjaga. Namun, menempatkan kesejahteraan petani di belakang selain tidak manusiawi dan zalim juga membuat kontinuitas produksi tak akan berkelanjutan.

Kemerdekaan petani

Untuk memeriksa apakah petani sejahtera atau tidak bisa didekati dari sisi paling riil: kemerdekaan petani. Jumlah petani saat ini 54 persen dari jumlah rakyat Indonesia. Logikanya, jika rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan, otomatis kemerdekaan dirasakan petani. Kemerdekaan petani yang tecermin pada kehidupan yang kian sejahtera atau justru sengsara setidaknya bisa diukur

dari tiga hal: tingkat pendidikan, aset ekonomi, tingkat kemandirian.

Menurut Sensus Pertanian (SP) 2013, kapasitas SDM pertanian amat rendah. Jumlah rumah tangga petani 26,14 juta, menurun 5,04 juta rumah tangga dari 2003. Sekitar 72 persen dari mereka yang bekerja di pertanian hanya berpendidikan atau tidak tamat SD, 26 persen lulus SMP, dan SMA dan hanya 1 persen lulus perguruan tinggi. Kapasitas pendidikan yang rendah membuat adopsi inovasi-teknologi jadi lambat.

Penguasaan modal (lahan dan pendanaan) petani amat terbatas. Menurut hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018, sebanyak 15,8 juta rumah tangga petani (57,1 persen) gurem (kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar), naik dari SP 2013 sebesar 55,3 persen. Keterbatasan modal tanah membuat pertanian tak lagi

jadi gantungan hidup dan bisa keluar dari jerat kemiskinan. Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) 2013 BPS mendapati, rata-rata pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian hanya Rp 12,4 juta per tahun atau Rp1 juta per bulan, amat jauh dari upah layak buruh pabrik.

Pendapatan ini hanya mampu menopang sepertiga kebutuhan. Sisanya disumbang kegiatan di luar pertanian, seperti *ngojek*, berdagang, dan jadi pekerja kasar. Fakta ini menunjukkan tak ada lagi "masyarakat petani", mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan itu. Karena tak menjanjikan kesejahteraan, logis kiranya pertanian dijauhi kaum muda terdidik. Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2018, sebesar 64 persen petani berusia lebih dari 45 tahun. Pertanian terancam

"gerontokrasi".

Kebijakan negara yang menyerahkan harga komoditas pangan, kecuali beras dan gula, kepada mekanisme pasar membuat petani kian sulit dan terjepit. Petani tidak hanya terjerat rentenir, mereka tidak berdaya menghadapi tengkulak saat panen. Ketika harga pangan naik, semua pihak, termasuk petinggi negara, teriak-teriak karena takut inflasi. Saat harga pangan jatuh, tak satupun yang membela petani. Petani negeri ini menyubsidi orang kaya lewat penyediaan pangan murah.



<input type="checkbox"/> Agro Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Jakarta	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	TANGGAL 21 NOV 2019
<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	HALAMAN 7
<input type="checkbox"/> Indo Pos	<input type="checkbox"/> Majalah Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Tani	RUBRIKASI <input type="checkbox"/> Berita
<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Berita Foto
<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Pelita	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input checked="" type="checkbox"/> Opini/Artikel
<input checked="" type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> The Jakarta Post	<input type="checkbox"/> Tajuk
<input type="checkbox"/> Kontan	<input type="checkbox"/> Republika		<input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur



Soal kemandirian, petani masih tergantung dari penyediaan pupuk fosfor, kalium, dan bibit ayam ras (DOC). Ketergantungan petani terhadap pestisida dan aneka bibit unggul yang dikuasai (hampir monopolistik) perusahaan multinasional juga masih tinggi. Bantuan pupuk dan bibit belum mampu memerdekakan petani dari ketergantungan input dari luar. Apa arti kemerdekaan jika dalam berproduksi semua

input petani bergantung pada pihak lain?

Soal kerja keras, kerja petani tak tertanggungkan. Kerja mereka di sawah 10 sampai 20 kali lebih berat ketimbang rekannya di ladang gandum. Diperkirakan beban seorang petani padi di Asia sekitar 3.000 jam kerja setiap tahun. Dalam buku *Outliers* (2009), Gladwell menulis, tidak seorang pun yang bangun sebelum subuh selama 360 hari dalam setahun gagal membuat keluarganya kaya. Lalu, mengapa petani kita tetap miskin?

Kehadiran negara

Mereka miskin karena tak memiliki modal apa pun, kecuali tenaga. Dalam kondisi seperti itu, negara tidak hadir. Tak dibuka akses modal, lahan, pengetahuan, kredit, dan pasar. Luasan lahan kecil dan kualitas SDM rendah tak boleh dijadikan dalih membiarkan petani miskin. Meski berlahan sempit, mereka tetap harus hidup layak. Seperti diulas Gladwell, desa di China berpenduduk 1.500 orang bisa menghidupi dirinya dengan lahan seluas 180 hektar (sekitar 0,3 hektar per keluarga,

ekuivalen lahan petani di Jawa). Indonesia ada dan kementerian dibentuk justru untuk membuat petani agar hidup layak.

Petani di negara lain makmur karena tugas petani dan keluarannya hanya bertani. Pemerintah membangun jalan raya dan jalan desa, menyediakan benih terbaik, pupuk dan pestisida/herbisida yang cocok, irigasi yang tak pernah kering, kredit berbunga rendah, mesin pertanian yang murah dan bisa dicicil. Pemerintah menjamin kegagalan panen dengan asuransi, harga jual yang menguntungkan dan membatasi pasar dalam negerinya dari produk asing (Pambudy, 2010). Intinya, petani dan pertanian dimulikan, dilindungi, dan tak diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang sering kali mematikan dan tak bisa dikontrol.

Ini semua dilakukan bukan karena pemerintah kasihan kepada petani. Namun, ada kesadaran mendasar bahwa ketersediaan pangan (*food*), pakan (*feed*), sandang-papan (*fibre*), bahan bakar (*fuel*), serta bahan obat yang berkesinambungan dari petani sangat penting untuk menjamin kualitas (jiwa, raga, dan kecerdasan) penduduk dan generasi mendatang. Ada kesadaran tak bergantung kepada pihak lain. Kemandirian itu, selain membuat kita berdaulat, juga menjamin keberlanjutan bangsa dan negara ini. Dengan kebijakan tepat, kebutuhan pangan, sandang, papan, bahan bakar, dan obat-obatan dapat dipenuhi petani dengan harga yang kompetitif. Pada saat yang sama, petani juga akan merdeka dan bisa hidup sejahtera karena usaha tani dijamin untung layak. Semoga mentan baru bisa mewujudkan harapan ini. K-7